

IMPLIKASI KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nurmaini¹, Muhammad Zakir², Zubaidah Assyifa³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email Korespondensi: nurmaini.230402@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implications of fiscal policy on income distribution and social welfare. Fiscal policy, which includes tax instruments and government spending, has a strategic role in creating economic equality and reducing social inequality. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods, based on secondary data obtained from various sources, such as government reports, academic journals and economic publications. The research results show that appropriate fiscal policies, such as a progressive tax system and effective allocation of social spending, can increase income distribution more evenly and promote social welfare. However, less than optimal policy implementation has the potential to worsen economic inequality. Therefore, continuous evaluation and policy design is needed based on the principles of justice and efficiency to achieve inclusive economic growth.

Keywords: Fiscal Policy, Income Distribution, Community Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal, yang mencakup instrumen perpajakan dan belanja pemerintah, memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, dan publikasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat, seperti sistem perpajakan progresif dan alokasi belanja sosial yang efektif, dapat meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih merata serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan yang kurang optimal berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perancangan kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan dan efisiensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Distribusi Pendapatan, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Iki pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara, kebijakan ini bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, serta distribusi pendapatan yang lebih merata (Huda 2017). Namun implementasi kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat (Mujasmara et al. 2023).

Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah alokasi sumber daya. Dengan anggaran pemerintah untuk berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kebijakan fiskal dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif (Isnaini 2017). Sebagai contoh, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan (Rachmad et al. 2023).

Selain itu, kebijakan fiskal berperan dalam distribusi pendapatan, dengan menerapkan sistem pajak progresif, memberikan bantuan sosial, dan tingkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kebijakan fiskal dapat membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata kepada masyarakat (Hafizd, Janwari, and Al-Hakim 2024). Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat menerapkan sistem k progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan renda. Selain itu, program batuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuanas untuk masyarakat miskin dapat membantu kelompok rentan (Khoiril 2024).

Fungsi stabilisasi juga menjadi peran penting kebijakan fiskal. Dengan menyesuaikan tingkat pajak dan belanja pemerintah sesuengan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung, kebijakan fiskal dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan dampak gejolak ekonomi. Misalnya, selama periode resesi, pemerintah menurunkan pajak dan/atau meningkatkan belanja pemerintah untuk mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan pajak dan/atau mengurangi belanja pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal yang efektif masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, analisis terhadap kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi yang kurang optimal dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan menurunkan kesejahteraan sosial (Pratama and Utama 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan seperti Universal Basic Income (UBI) di Brasil memiliki potensi untuk secara signifikan mengur kemiskinan dan ketimpangan, serta secara fiskal layak untuk diterapkan. Selain itu, model teoretis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat mengarahkan perekonomian menuju distribusi kekayaan yang lebih egaliter, sementara kebijakan yang tidak tepat dapat menyeban polarisasi kekayaan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada efektivitas instrumen perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

LITERATUR RIVIEW

Literatur review dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, distribusi pendapatan,

dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan dalam literatur review ini mencakup landasan teori kebijakan fiskal, hubungan kebijakan fiskal dengan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta temuan dari penelitian sebelumnya.

Konsep dan Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan (Fathurrahman 2012).

Menurut Keynesian Economics, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengendalikan siklus ekonomi, di mana peningkatan belanja pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi (Hakiki et al. 2024).

Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang merata menjadi salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Menurut teori redistribusi pendapatan, kebijakan pajak progresif dan subsidi sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi (Zai and Sabailaket 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pajak yang baik, seperti pajak penghasilan progresif dan transfer sosial, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa alokasi belanja pemerintah yang tepat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Rotinsulu and Kawung 2018). Studi di beberapa negara menunjukkan bahwa peningkatan belanja sosial berkontribusi signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Sendouw, Rumat, and Rotinsulu 2019).

Studi Empiris tentang Kebijakan Fiskal di Berbagai Negara

Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendistribusikan pendapatan secara lebih merata:

- a. Studi di negara maju menunjukkan bahwa kebijakan pajak progresif dan subsidi sosial berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan ([Piketty, 2014](#)).
- b. Studi di negara berkembang mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan fiskal berpotensi meningkatkan kesejahteraan, efektivitasnya masih terkendala oleh korupsi dan administrasi pajak yang lemah ([World Bank, 2021](#); Firdausy 2021).
- c. Di Indonesia, beberapa penelitian menemukan bahwa program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas distribusinya ([BPS, 2022](#); Arif et al. 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** untuk menganalisis implikasi kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal diterapkan dan menganalisis dampaknya terhadap distribusi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data sekunder**, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti: Laporan pemerintah (APBN, laporan Kementerian Keuangan, dan BPS), Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang relevan dengan kebijakan fiskal, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, Laporan dari organisasi internasional seperti Bank Dunia (World Bank), IMF, dan OECD yang membahas kebijakan fiskal di berbagai negara, dan studi kasus kebijakan fiskal di Indonesia dan negara lain sebagai bahan perbandingan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi literatur**, yaitu menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, jurnal internasional, dan dokumen kebijakan pemerintah.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Langkah-langkah analisis meliputi: Kategorisasi data berdasarkan kebijakan fiskal, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, Identifikasi pola dan hubungan antara kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi, dan Interpretasi data untuk menarik kesimpulan terkait efektivitas kebijakan fiskal dalam menciptakan pemerataan ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, dan studi kasus di berbagai negara, ditemukan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang signifikan dalam membentuk struktur ekonomi suatu negara, baik dalam konteks pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan

a. Peran Pajak dalam Pemerataan Pendapatan

Salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berdampak pada distribusi pendapatan adalah pajak. Pajak progresif, di mana tingkat pajak meningkat seiring dengan

meningkatkan pendapatan individu atau perusahaan, dianggap sebagai mekanisme yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pajak progresif diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, dengan tarif yang meningkat seiring besarnya pendapatan. Namun, efektivitas pajak dalam redistribusi pendapatan masih menghadapi tantangan, seperti tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan adanya praktik penghindaran pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi.

Studi oleh (Adam, Hamin, and Hasim 2024) menunjukkan bahwa pajak progresif yang diterapkan dengan baik mampu mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan kelompok elit dan meningkatkan kesempatan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun, dalam praktiknya, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan pajak masih kurang optimal dalam mengatasi ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas administrasi pajak, kebocoran dalam sistem perpajakan, serta maraknya penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan multinasional dan individu kaya.

b. Transfer Sosial dan Subsidi Pemerintah

Selain pajak, transfer sosial dan subsidi pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendistribusikan kembali pendapatan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi energi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Studi dari World Bank (2021) menemukan bahwa program PKH di Indonesia telah berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi program bantuan sosial adalah ketepatan sasaran. Banyak kasus di mana penerima manfaat tidak benar-benar berasal dari kelompok miskin, sementara beberapa rumah tangga miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya validasi data dan tidak efektifnya sistem distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan penerima manfaat, misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan.

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

a. Investasi Pemerintah di Sektor Publik

Investasi pemerintah dalam sektor publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Barro (1990) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, efektivitas anggaran ini masih menjadi perdebatan, karena kualitas pendidikan di berbagai daerah masih belum merata. Banyak sekolah di daerah tertinggal masih mengalami keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Oleh karena itu, meskipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, hasil yang dicapai masih perlu dioptimalkan dengan kebijakan yang lebih spesifik dan terarah.

Di sektor kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun, tantangan utama dalam implementasi program ini adalah defisit anggaran BPJS yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan biaya klaim. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan kesehatan meningkat, kualitas layanan kesehatan masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai.

b. Dampak Subsidi dan Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat

Subsidi energi, seperti subsidi BBM dan listrik, juga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan subsidi sering kali menjadi dilema bagi pemerintah, karena di satu sisi membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain dapat membebani anggaran negara dan memicu defisit fiskal.

Sebagai contoh, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengurangi subsidi BBM pada tahun 2014 menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan, dampaknya terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah cukup besar. Oleh karena itu, kebijakan subsidi harus diterapkan dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.

Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain dan implementasinya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan fiskal antara lain:

- a. Kualitas Administrasi Pajak – Pemerintah harus meningkatkan sistem perpajakan agar lebih transparan dan efisien dalam mengumpulkan penerimaan pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi.
- b. Ketepatan Sasaran Program Sosial – Program bantuan sosial harus didukung oleh sistem pendataan yang lebih akurat agar dapat mencapai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- c. Alokasi Anggaran yang Efektif – Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja publik difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- d. Stabilitas Ekonomi Makro – Kebijakan fiskal harus seimbang dengan kebijakan moneter agar dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari dampak negatif seperti inflasi tinggi atau defisit anggaran yang berlebihan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada

implementasi yang baik, perencanaan yang matang, serta komitmen pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan strategi kebijakan yang lebih baik dan reformasi di berbagai sektor, diharapkan kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Adam, Moh Nasrul Arief Setiawan, Dewi Indrayani Hamin, and Hasim Hasim. 2024. "Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, Dan Dampak Sosial." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 7(2): 1011–24.
- Arif, Sirajudin, Widjajanti Isdijoso, Akhmad Ramadhan Fatah, and Ana Rosidha Tamyis. 2020. "Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Indonesia." *Jakarta: SMERU Research Institute*.
- Fathurrahman, Ayief. 2012. "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13(1): 72–82.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2021. *Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Yadi Januari, and Sofian Al-Hakim. 2024. "Kebijakan Fiskal Di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi Dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3(2): 146–67.
- Hakiki, Ach, Babay Suhaemi, Muhammad Nadhir Mua'mmar, and Dewi Kurniasari. 2024. "Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal Dan Inflasi Pada Pertumbuhan Ekonomi." *PRESTISE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis* 4(1): 41–63.
- Huda, Nurul. 2017. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Prenada Media.
- Isnaini, Desi. 2017. "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara." *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3(1).
- Khoirul, Frisca Aurelia Amanda. 2024. "Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan Dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Political Studies* 4(1): 1–8.
- Mujasmara, Fildzah Darayani et al. 2023. "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6): 2986–97.
- Pratama, NRNS, and Made Suyana Utama. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8(7): 651–80.
- Rachmad, Alfarid Fadhil, Ezra Azaria, Qika Nur Xusan, and Nabillah Azzahra. 2023. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(02): 75–88.
- Rotinsulu, Andi Maujung Tjodi¹ Try Oldy, and George M V Kawung. 2018. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol* 19(8).
- Sendouw, Agustien, Vekie Adolf Rumaté, and Debby Ch Rotinsulu. 2019. "Pengaruh Belanja

Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18(5).
Zai, Septiniat, and Ani Susanti Sabailaket. 2024. “Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1(1): 8–14.